



LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD  
KOTA BALIKPAPAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini merupakan wujud laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi acuan serta evaluasi bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan di masa mendatang. Selain itu, LKJIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan juga kepada masyarakat/publik.

Kami menyadari bahwa dokumen LKJIP ini masih belum sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan sangat kami harapkan guna perbaikan kami dimasa yang akan datang. Atas tersusunya LKJIP ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang turut memberikan kontribusi terhadap penyusunan LKJIP ini.

Balikpapan, 25 Maret 2024  
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan,  
  
  
AREJANSYAH, S.T., M.Si

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut memuat review atau gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Masing-masing sasaran diturunkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing unit kerja yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Seluruh sasaran ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	64,86
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks	72

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	4
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Perencanaan Strategis.....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	23
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
2.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>31</b>
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya .....	31
3.2. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	33
3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis .....	36

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional ( <i>Benchmark</i> Kinerja).....	37
3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	38
3.2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.2.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	47
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	62
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.....	9
Tabel 1. 2 Analisis Permasalahan Perangkat Daerah .....	11
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 .....	16
Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	17
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	23
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 .....	25
Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....	26
Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	31
Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 .....	32
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	33
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	34
Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan.....	35
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026 .....	36
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) .....	37
Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023 .....	38
Tabel 3. 9 Nilai Interval Perhitungan Survei Kepuasan .....	41
Tabel 3. 10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	42
Tabel 3. 11 Jumlah Aset yang dimilikid dan tidak dipakai.....	44
Tabel 3. 12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) .....	45
Tabel 3. 13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja .....	47
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	55



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretarat DPRD Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan .....	43
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka terwujudnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang mendukung good governance, diperlukan proses perencanaan, pengendalian serta pertanggung jawaban yang tepat dan terukur sehingga dapat mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah yang diharapkan. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sementara substansi Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk Menyusun dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang bersumber dari APBD. Dalam hal ini, setiap tahun secara periodik perangkat daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai instansi Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026 dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023. Dokumen ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Maksud :
  - a. Memahami tujuan pelaksanaan system akuntabilitas di Sekretariat DPRD;
  - b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menyusun evaluasi kinerja per bagian.
2. Tujuan :
  - a. Memperoleh gambaran / reviu tentang implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD;

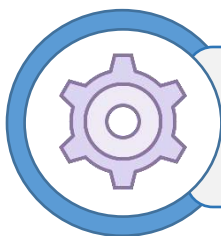
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam rangka mencapai fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam peranannya tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan memiliki aparatur yang kompeten serta sarana prasarana serta pendanaan yang memadai untuk melaksanakan fasilitasi yang optimal terhadap DPRD Kota Balikpapan.

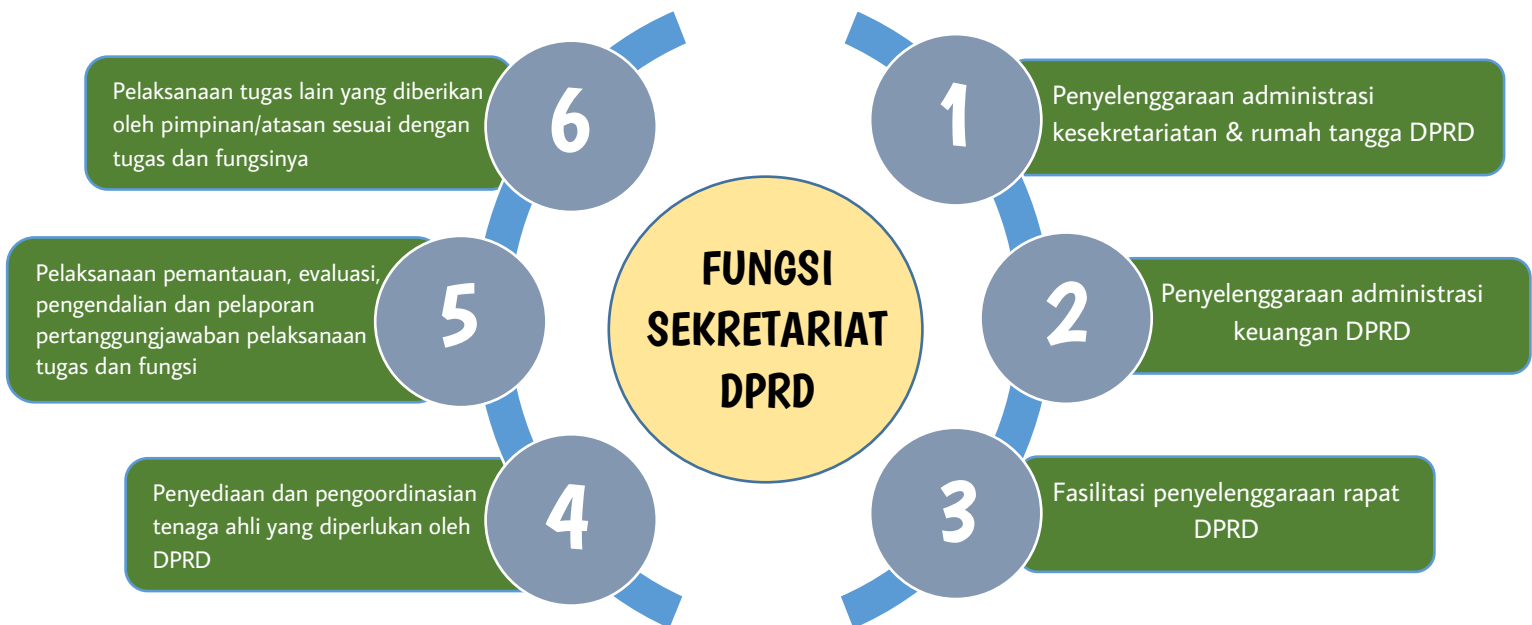
### **TUGAS SEKRETARIAT DPRD**



Tugas Sekretariat DPRD adalah melaksanakan urusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

**Peraturan Wali Kota Balikpapan  
Nomor 1 Tahun 2022**

Adapun untuk melaksanakan Tugas Pokok di atas Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai fungsi sebagai berikut.



Penataan struktur dan besaran organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Atas dasar pertimbangan lingkup beban kerja tersebut, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam hal kelembagaan, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural dan fungsional yaitu Sekretaris DPRD, 3 (Tiga) Kepala Bagian, 1 Kepala Sub Bagian, serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana lainnya. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan. Demikian pula

ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut. Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut.



*Sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan No. 1 tahun 2022*

**Sekretaris DPRD** sebagai pimpinan perangkat daerah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian umum** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum;
- b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD;
- c. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar yang diperlukan oleh DPRD;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keuangan** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
- g. pengoordinasian pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

- h. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- i. penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang - Undangan** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang - Undangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pembentukan alat kelengkapan DPRD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sidang/rapat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, peninjauan Dewan serta pertemuan dengan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
- e. penyiapan rancangan produk hukum Daerah DPRD;
- f. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan produk hukum Daerah atas inisiatif DPRD;
- g. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi pengkajian produk hukum Daerah;
- h. pelaksanaan sistem dokumentasi produk hukum dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pemberian informasi produk hukum dan dokumentasi hukum;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
- l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna memaksimalkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu dukungan SDM yang memadai, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan SDM baik secara kuantitatif dan kualitatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD didukung dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dan tenaga Non ASN sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang dengan komposisi berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan sebagai berikut.

*Tabel 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023*

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris	1		1				1					
Kabag	1	2	3				1	2				
Kasubbag	1			1				1				
Fungsional	2	2		4				4				
Pelaksana	11	7		7	11			4	2	10	1	
Non ASN	26	21					2	10	1	31	3	
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

## 1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek Strategis seperti halnya pada kebijakan umum untuk mengoptimisasi fasilitasi terhadap DPRD Kota Balikpapan, antara lain :

1. Upaya Pelayanan
  - a. Pengadaan Inovasi/ Aplikasi yang mempermudah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
  - b. Perbaikan Standar Pelayanan
  - c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Sumber Daya Manusia
  - a. Tersedianya tenaga bantuan yang cukup untuk membantu tugas pendampingan
  - b. Peningkatan kompetensi ASN melalui bimtek

Permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi di antaranya adalah:

### 1. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sehingga hal tersebut berpotensi adanya lintas kegiatan

yang dikerjakan oleh antar unit bagian, sehingga akan berpotensi menyulitkan pada pengukuran kinerja;

2. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal;

3. Dinamika Sosial dan Politik

Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD dan bergantung pada dinamika sosial dan politik yang berkembang.

*Tabel 1. 2 Analisis Permasalahan Perangkat Daerah*

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan OPD)	Eksteral (Diluar Kewenangan OPD)	Permasalahan Pelayanan OPD
Kelembagaan dan Organisasi	Belum menyesuaikan Permendagri 104/2016	Perwali Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2022	Pengampu kegiatan dibagi sesuai dengan tupoksi yang terkait		Tumpang tindih pengampu kegiatan
Sumber Daya Manusia	Jumlah anggota DPRD 45 orang. SDM Sekretariat 74 orang				Dengan pelaksanaan tugas pokok dalam memfasilitasi, belum sebanding dengan mobilitas kegiatan yang harus di fasilitasi
Dinamika Sosial dan Politik				Kinerja bergantung pada DPRD	

## 1.6. Sistematika Penulisan

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, gambaran umum Perangkat Daerah, Aspek strategis dan permasalahan yang utama dihadapi Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi gambaran Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi Laporan Capaian Kinerja Organisasi, target dan realisasi kinerja Tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja tahun 2021-2026, realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra, realisasi kinerja mengacu pada standar nasional/lainnya, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja), dan realisasi anggaran tahun 2023.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Penetapan Visi dan Misi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota  
Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan  
Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”***

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

**Kota Terkemuka:** Kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas

penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian baru dalam Kawasan Coastal Road, Pengembangan Pusat Pendidikan Teknologi se Kalimantan, Posisi Strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industry dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat.

**Nyaman Dihuni:** Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

**Madinatul Iman:** Memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Madinatul Iman juga mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan Pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai Kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan Bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal sholeh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

**Misi** adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita/ tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dimana misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dengan misi tersebut diharapkan seluruh stakeholders dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman” terbentuklah misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang tersusun dalam RPJMD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut.

- Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
- Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
- Misi 4 : Mewujudkan kota yang nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Kota Balikpapan (Walikota dan OPD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan perangkat pemerintah

daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, dan Kegiatan. Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menggunakan misi dari Walikota Balikpapan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu : “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik”, yang kemudian menjadi Tujuan Kota, yaitu : Meningkatkan Profesionalitas dan transparansi birokrasi” dengan Sasaran : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”. Misi serta tujuan dan sasaran RPJMD ini kemudian menjadi acuan perumusan Tujuan dan Sasaran serta Strategi Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

*Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026*

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	70	72	74	76	78
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	29	30	31
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	n/a	70	72	74	76	78

Pada sub bab ini menyajikan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Sekretariat DPRD. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 merupakan tahun kedua efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2023.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan Kembali oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melaksanakan pemetaan program kegiatan Tahun 2023 yang disesuaikan dengan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
						Pengamanan BMD SKPD
						Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD
						Penatausahaan BMD pada SKPD
						Pemanfaatan BMD SKPD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Urusan Pemerintahan Daerah  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	72	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ Atau Naskah Akademik Penyusunan Tata Tertib DPRD
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Pengawasan Penggunaan Anggaran

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
						Pendalaman Tugas DPRD
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						Penyediaan Kelompok Pakar dan tim Ahli
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						Penyusunan Program Kerja DPRD
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
					Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Pelaksanaan Reses	
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD
						Pengawasan Kode Etik DPRD
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
					Fasilitasi Tugas DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya. Maka, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan.

Pada sub bab ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Nomor 188.46/01.17.1/SETWAN tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adanya perubahan IKU dikarenakan terdapat target sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam dokumen	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan <i>Terdapat dan Tidak Terdapat per Unit x Nilai Pembiayaan Terdapat dan Tidak Terdapat</i>	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian penting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya. Pemerintah Kota Balikpapan membuat Perjanjian Kinerja dengan para *stakeholders* pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Perencanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan dengan efisien, sehingga diharapkan akan lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan.



Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	64,86
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	72

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 99.825.558.662	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 51.329.136.548	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 151.154.695.210</b>	

Tugas Sekretaris DPRD Kota Balikpapan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Perwali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 yaitu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana pelayanan yang diberikan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan.

#### 2.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 merupakan tahun kedua efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2023. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026. Data dalam

tabel di bawah ini menegambarkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.

*Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		93,056,731,198	99,825,558,662
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,446,070,100	5,678,249,935
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,446,070,100	5,678,249,935
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	645,660,000	601,700,000
5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85,960,000	62,000,000
6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	559,700,000	539,700,000
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,735,614,848	34,960,350,027
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	181,139,800	181,139,800
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,146,335,400	8,699,005,400
10		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,199,925,000	1,099,925,000
11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,409,222,596	2,209,222,596
12		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	549,999,800	399,999,800
13		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	449,992,000	399,992,000
14		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,623,752,000	6,623,758,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN
15		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,175,284,252	15,347,307,431
16		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,108,040,000</b>	<b>3,856,840,000</b>
17		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,108,040,000	3,856,840,000
18		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6,581,717,500</b>	<b>7,191,717,500</b>
19		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	880,000,000	1,300,000,000
20		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,029,737,500	2,219,737,500
21		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,671,980,000	3,671,980,000
22		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>2,899,999,400</b>
23		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,100,000,000	1,499,999,400
24		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,550,000,000	1,400,000,000
25		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>39,849,592,000</b>	<b>40,086,663,800</b>
26		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	38,449,867,000	38,983,628,000
27		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	883,980,000	942,565,800
28		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	515,745,000	160,470,000
29		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>5,040,036,750</b>	<b>4,550,038,000</b>

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN
30		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1,040,172,000	890,172,000
31		Fasilitasi Fraksi DPRD	649,998,750	110,000,000
32		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	849,866,000	849,866,000
33		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,500,000,000	2,700,000,000
34	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>50,030,442,229</b>	<b>51,329,136,548</b>
35		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>9,782,999,750</b>	<b>10,661,847,648</b>
36		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32,999,750	179,964,500
38		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,500,000,000	5,096,137,548
39		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2,750,000,000	3,131,872,800
40		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2,750,000,000	2,253,872,800
41		Penyusunan Tata Tertib DPRD	750,000,000	0
42		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>3,800,000,000</b>	<b>3,847,962,600</b>
43		Pembahasan KUA dan PPAS	800,000,000	850,000,000
44		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	800,000,000	700,000,000
45		Pembahasan APBD	800,000,000	1,447,912,600
46		Pembahasan APBD Perubahan	800,000,000	650,050,000
47		Pembahasan Laporan Semester	300,000,000	150,000,000
48		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	300,000,000	50,000,000
49		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>5,099,997,500</b>	<b>2,794,297,500</b>

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN
50		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	750,000,000	640,000,000
51		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	750,000,000	620,000,000
52		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	750,000,000	600,000,000
53		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	750,000,000	640,000,000
54		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	750,000,000	0
55		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	749,999,500	49,999,500
56		Pengawasan Penggunaan Anggaran	299,999,050	194,299,050
57		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	299,998,950	49,998,950
58		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>10,660,448,179</b>	<b>12,564,499,900</b>
59		Orientasi DPRD	165,000,000	165,000,000
60		Pendalaman Tugas DPRD	2,500,000,000	2,000,000,000
61		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6,413,000,000	9,063,000,000
62		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	709,368,279	782,500,000
63		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	508,080,000	189,000,000
64		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	199,999,900	199,999,900
65		Penyusunan Program Kerja DPRD	165,000,000	165,000,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN
66		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5,700,000,000	11,881,994,900
67		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2,700,000,000	8,146,840,000
68		Pelaksanaan Reses	3,000,000,000	3,735,134,900
69		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1,099,498,250	749,498,250
70		Penyusunan Kode Etik DPRD	449,999,250	49,999,250
71		Pengawasan Kode Etik DPRD	649,499,000	699,499,000
72		Pembahasan Kerja Sama Daerah	399,999,980	319,324,300
73		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	249,999,900	5,044,800
74		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	149,999,900	314,279,500
75		Fasilitasi Tugas DPRD	13,487,498,750	8,509,711,450
76		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	357,499,750	207,499,750
77		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2,500,000,000	4,300,000,000
78		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8,379,999,000	852,211,700
79		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2,250,000,000	3,150,000,000

Pada tabel tersebut, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 kepada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 140,869,831,075,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 151,154,695,210,- untuk membiayai 2 program, 16 kegiatan, dan 60 sub kegiatan pada Tahun 2023. Terhadap penilaian dan pengukuran pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 akan ditampilkan pada bab berikutnya.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pengukuran pelaksanaan implementasi SAKIP serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2022 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 64,86 dengan Predikat B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, terlihat masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, dengan pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon II.

Pada sub bab ini disajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	22,03
2	Pengukuran Kinerja	30	19,36
3	Pelaporan Kinerja	15	10,54
4	Evaluasi Kinerja	25	12,93
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,86</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B (Baik)</b>

Selain itu, sub bab ini juga menyajikan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja  
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023*

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Tindaklanjuti hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja	Telah menindaklanjuti dengan melengkapi evidence dari rekomendasi atas LHP Sekretariat DPRD, evaluasi rencana aksi, dan penerapan sistem reward punishment
2	Perencanaan Kinerja	Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, guna pemanfaatan hasil perencanaan kinerja secara berkesinambungan	Telah ditindak Lanjuti dengan pelaksanaan Survei Internal Pegawai
3	Pengukuran Kinerja	Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) guna melakukan pengukuran kinerja yang efektif dan efisien	Telah ditindak lanjuti dengan penggunaan aplikasi REAKSI
4	Pengukuran Kinerja	Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Telah ditindak Lanjuti dengan pelaksanaan Survei Internal Pegawai
5	Pelaporan Kinerja	Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Telah ditindak Lanjuti dengan pelaksanaan Survei Internal Pegawai

### 3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah serta perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan dan sub kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala pengukuran ordinal, sebagai berikut:

*Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja*

No.	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90.01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75.01% ≤ 90%	Tinggi
3.	65.01% ≤ 75%	Sedang
4.	50.01% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Keterangan: berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017*

#### 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam perubahan IKU Sekretariat DPRD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	64,86	64,86	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks	72	72,79	101	Sangat Tinggi

Dari capaian target kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dan diperjanjikan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah tercapai bahkan melampaui target yang direncanakan.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100 % pada tahun 2023 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi". Dengan demikian maka secara umum Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

### 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada periode ini telah menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan. Oleh karena itu, terdapat sasaran strategis yang tidak dapat diukur capaian ditahun sebelumnya.

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	63,09	-	64,59	-	64,86	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	-	-	65,85	94,07%	72,79	101%

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Realisasi dari sasaran tersebut meningkat setiap tahunnya namun untuk presentase capaian tidak dapat dibandingkan karena tidak disusunnya target untuk sasaran strategis tersebut ditahun sebelumnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Indikator : Realisasi dan capaian dari sasaran tersebut meningkat setiap tahunnya namun untuk Periode awal Renstra masih menggunakan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya.

### 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

*Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	64,86	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks	72,79	78	93%

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD” telah menunjukkan capaian sebesar 93% dari target akhir Renstra. Sedangkan, sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” tidak dapat disandingkan dengan target akhir Renstra, karena sasaran tersebut tidak tertuang pada perencanaan Renstra 2021-2026 melainkan tertuang pada IKU Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2023.

### 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Pada sub bab ini memuat perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*) sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	64,86	-
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks	72,79	-

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*), karena Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

### 3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100	√				
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	101	√				

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 100%, namun realisasi tersebut masih menggunakan realisasi penilaian SAKIP tahun 2022 karena menyesuaikan dari target sasaran strategis yang juga ditetapkan berdasarkan hasil realisasi tahun sebelumnya. Sasaran strategis tersebut merupakan perubahan dari IKU tahun 2023 dikarenakan untuk target sasaran strategis sebelumnya sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Insektorat, menerapkan sistem *reward punishment* kepada bagian-bagian, perencanaan dengan seluruh *stake holders*, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Dari tabel 3.8 dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 101%. Capaian kinerja yang melebihi target tersebut dikarenakan perolehan capaian diperoleh dari hasil survei kepuasan DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD selama masa periode yang telah berjalan. Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survei kepuasan tersebut yang memuat 6 unsur pelayanan yaitu sebagai berikut.

- 1) Dukungan sumber daya manusia
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana
- 3) Pelayanan perjalanan dinas
- 4) Pelayanan kehumasan dan keprotokolan
- 5) Pelayanan persidangan risalah dan perundangan, serta
- 6) Pelayanan administrasi keuangan.

Selanjutnya untuk pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

1. Setiap pertanyaan survey masing – masing diberi nilai, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terdapat unsurunsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama, Nilai ditetapkan dengan rumus yaitu Bobot nilai rata-rata tertimbang =  $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = n$

Untuk memperoleh nilai survei kepuasan DPRD digunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam perhitungan indeks kepuasan terdapat 29 pertanyaan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{28} = 0,0357$$

2. Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 20 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20 dengan tujuan sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM ( sebelum konversi ) } \times 20$$

Adapun nilai persepsi nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

*Tabel 3. 9 Nilai Interval Perhitungan Survei Kepuasan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konservasi	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	20,00-64,99	D	Tidak Baik
2	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	76,61-88,30	B	Baik
4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh nilai indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD sebesar 72,79 yaitu 101% dari target (72) kinerja tahun 2023. Capaian yang melebihi dari target tersebut membuktikan bahwa fasilitasi Sekretariat DPRD telah melakukan perbaikan dalam menjalankan pelayanan yang lebih baik.

Beberapa alternatif solusi/ upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut adalah dengan peningkatan SDM Sekretariat DPRD melalui bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan lainnya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas, monitoring serta perbaikan terhadap pelayanan dalam fasilitasi tugas dan fungsi kedewanan, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, upaya perbaikan yang dilakukan yaitu menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD terhadap pelayanan yang diberikan atas fasilitasi Sekretariat DPRD.

### 3.2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

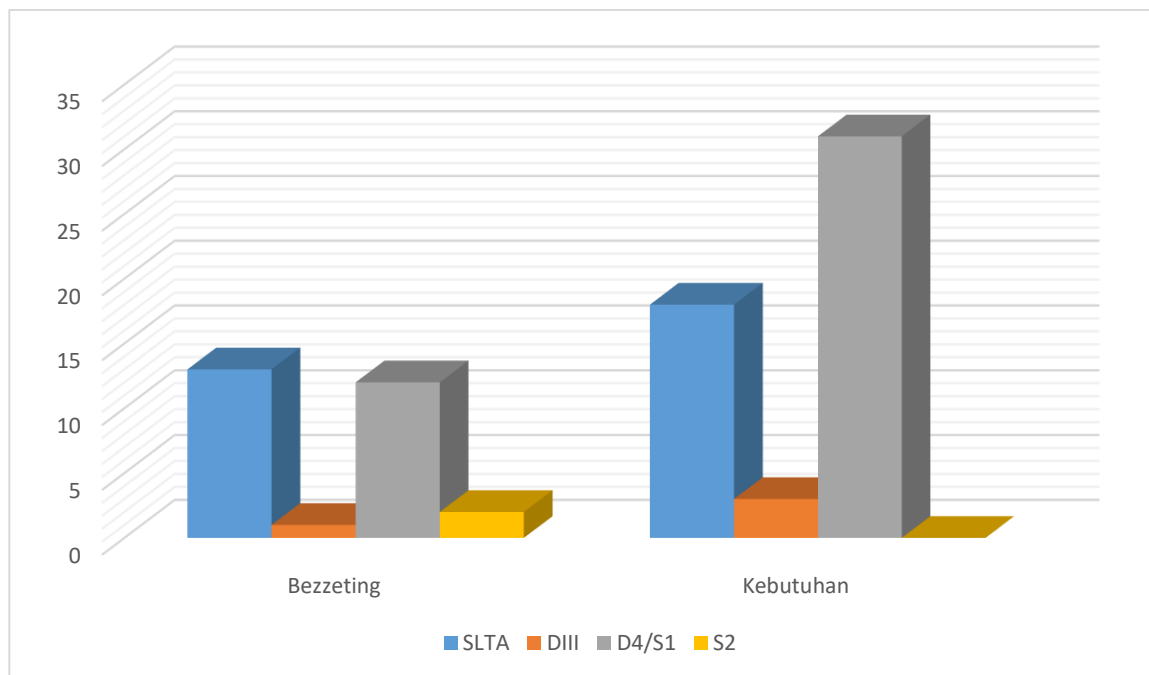
Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 61 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hanya didukung oleh 27 orang ASN/ PNS.

**Tabel 3. 10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – Laki (L)	Perempuan (P)
1.	Sekretaris DPRD	1	-
2.	Kepala Bagian Umum	1	-
3.	Kepala Bagian Keuangan	-	1
4.	Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-Undangan	-	1
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	-	1
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1
7.	Analisis Hukum Ahli Muda	1	-
8.	Pranata Humas Ahli Muda	1	-
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	-
10.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
11.	Penata Layanan Operasional	3	-
12.	Pengadministrasi Perkantoran	7	4
Jumlah		18	9

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :

**Diagram 3.1 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretarat DPRD Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan**



Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SLTA berjumlah 13 orang atau 48% dari total jumlah pegawai, kemudian diikuti oleh kebutuhan Bezzeting pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 13 orang atau 72% dari target kebutuhan, pendidikan D3 berjumlah 1 orang atau 33% dari target kebutuhan, pendidikan D4/S1 berjumlah 11 orang atau 35% dari target kebutuhan dan S2 berjumlah 2 orang. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak atau Pegawai dengan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oleh karena itu, kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni sangat mempengaruhi dalam pencapaian kualitas kinerja yang baik untuk mendukung tupoksi Instansi.

## 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan atas Belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3. 11 Jumlah Aset yang dimilikid dan tidak dipakai*

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Keterangan
		Unit	Rp.	
1.	Mobil	4	2.864.300.000	-
2.	Pompa Air	1	12.321.000	-
3.	LCD Projector/ Infocus	3	17.900.000	-
4.	Alat Penghancur Kertas	7	24.642.000	-
5.	Meja Makan Kayu	4	15.960.000	-
6.	Meja Makan Kayu	4	16.600.000	-
7.	Sofa	7	49.339.000	-
8.	Lemari Es	3	19.710.000	-
9.	AC Split	14	107.200.000	-
10.	Kipas Angin	2	7.000.000	-
11.	Oven Listrik	5	10.380.000	-
12.	Televisi	6	67.500.000	-
13.	Personal Computer	24	277.200.000	-
14.	Scanner	7	50.870.300	-
15.	Printer	20	140.920.000	-
16.	Laptop	12	277.500.000	-
17.	Finger Printer Time	3	14.800.000	-
18.	Vacum Cleaner	4	15.990.000	-
	<b>Jumlah</b>		<b>3.990.132.300</b>	

### 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3. 12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	64,86	64,86	100	99.825.558.662	86.095.796.167	86,24	13,75
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	72	72,79	101	51.329.136.548	36.222.819.316	70,56	30,13

Berdasarkan tabel 3.12 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Sekretariat DPRD tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencukupi dengan capaian kinerja 100 % dan capaian penyerapan anggaran 86,24 % serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,75%. Efisiensi tersebut terjadi karena harga pembelian dari beberapa belanja penggandaan dan belanja jamuan tamu atau makan dan minum rapat lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi penggunaan barang. Demikian juga belanja penyediaan air dan listrik gedung kantor yang menyesuaikan penggunaan selama periode yang telah berjalan.
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD telah mencukupi dengan capaian kinerja 101 % dan capaian penyerapan anggaran 70,56 % serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 30,13%. Efisiensi tersebut terjadi karena pada hakikatnya pelaksanaan belanja dan jasa untuk mendukung sasaran tersebut sangat bergantung pada kegiatan atau kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Seperti belanja paket meeting dalam/luar kota dan belanja makan minum rapat yang menyesuaikan agenda rapat-rapat dari DPRD. Fasilitas dalam Pembahasan Pembentukan dan Rancangan Perda, Kajian, maupun Naskah Akademik yang menyesuaikan kebutuhan dari kinerja agenda DPRD. Begitu juga dalam fasilitas tiap masing-masing AKD yang menyesuaikan dari kinerja masing-masing AKD. Selain itu,

terdapat kegiatan orientasi DPRD yang ditiadakan, mengingat kegiatan tersebut hanya dilaksanakan untuk pembekalan pada anggota DPRD baru.

### 3.2.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Secara umum kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 telah terlaksana dengan optimal. Hal ini tentunya patut mendapat apresiasi khusus dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian kinerja DPRD Kota Balikpapan, mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga menghasilkan suatu keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Pada sub bab ini memuat analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

*Tabel 3. 13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	118,71
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125,86
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118,97
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	118,58
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	117,94

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
					Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117,35
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,14
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	102,53
				Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	99,36
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	82,5
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	60
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
					Kebijakan Anggaran	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	75
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	50
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	90

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD telah memperoleh capaian 100%. Untuk mewujudkan target capaian sasaran tersebut telah didukung dengan beberapa kegiatan Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD yang didukung dan melibatkan seluruh *stake holders*, pemantauan dan evaluasi berkala terkait progres dan pencapaian kinerja, penguatan pelaporan capaian kinerja serta peningkatan kapasitas SDM pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Beberapa kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan.

- ❖ Melaksanakan rapat dan koordinasi terkait perencanaan anggaran serta perencanaan kinerja secara konsistensi dalam mendukung Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran per triwulan tahun berjalan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



- ❖ Melaksanakan apel rutin mingguan sebagai bentuk evaluasi kinerja mingguan dan persiapan kinerja mingguan.



- ❖ Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



- ❖ Mengadakan rapat kerja Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota) dalam rangka membangun peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi kedewanan.



- ❖ Melakukan survei kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang telah diberikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN DPRD TERHADAP FASILITASI SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023						
<p>Diingatlah bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan DPRD Kota Balikpapan dalam menerima pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan.</p>						
<p>PROFIL RESPONDEN:</p> <p>NAMA: _____</p> <p>KELOMPOK: _____</p> <p>FRAKSI: _____</p>						
<p>Berilah tanda silang (X) pada kolom yang menunjukkan jawaban yang berlaku</p>						
		Sangat Pau	Pau	Lum Pau	Cukup Pau	Tidak Pau
<p>A. Kepuasan terhadap layanan dan fasilitas yang diberikan</p>						
1.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>B. Persepsi tentang efektivitas</p>						
1.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kepercayaan terhadap kemampuan dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Sedangkan, pada sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD telah mencapai 101%. Hal ini menunjukkan dengan adanya integritas perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPRD dengan Sekretariat DPRD karena didukung dengan berbagai kegiatan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- ❖ Menyusun dan membahas terkait kesiapan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan agenda DPRD.



- ❖ Mengadakan rapat dan koordinasi terkait pembahasan agenda kerja bulanan AKD bersama dengan Badan Musyawarah sebagai bentuk harmonisasi dan keselarasan kinerja antara Sekretariat dan DPRD.



- ❖ Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja dan Kunjungan Lapangan DPRD dengan Perangkat Daerah pengampu urusan pemerintahan.



- ❖ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Kota Balikpapan oleh DPRD.



- ❖ Melakukan bimbingan teknis atau pendalaman tugas DPRD sebagai bentuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.



- ❖ Melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang dalam membentuk Kajian dan Naskah Akademik DPRD Kota Balikpapan.



### 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 81 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	<b>MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>99.825.558.662</b>	<b>86.095.796.167</b>	<b>86,25%</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.678.249.935</b>	<b>4.780.521.295</b>	<b>84,19%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.678.249.935	4.780.521.295	84,19%
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>601.700.000</b>	<b>584.691.318</b>	<b>97,17%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.000.000	47.970.625	77,37%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	539.700.000	536.720.693	99,45%
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.960.350.027</b>	<b>31.799.471.391</b>	<b>90,96%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	181.139.800	62.996.083	34,78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.699.005.400	7.954.986.600	91,45%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.099.925.000	769.533.250	69,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.209.222.596	1.746.648.958	79,06%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	399.999.800	81.347.500	20,34%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	399.992.000	202.800.000	50,70%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.623.758.000	6.415.131.447	96,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.347.307.431	14.566.027.553	94,91%
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.856.840.000</b>	<b>2.864.300.000</b>	<b>74,27%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.856.840.000	2.864.300.000	74,27%

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.191.717.500</b>	<b>5.315.861.195</b>	<b>73,92%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	757.147.663	58,24%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.219.737.500	1.137.114.810	51,23%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.671.980.000	3.421.598.722	93,18%
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.899.999.400</b>	<b>2.279.902.532</b>	<b>78,62%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.499.999.400	1.146.630.661	76,44%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000.000	1.133.271.871	80,95%
7	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>40.086.663.800</b>	<b>35.211.475.384</b>	<b>87,84%</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	38.983.628.000	34.230.805.884	87,81%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	942.565.800	897.290.000	95,20%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	160.470.000	83.379.500	51,96%
8	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>4.550.038.000</b>	<b>3.259.573.052</b>	<b>71,64%</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	890.172.000	570.881.867	64,13%
	Fasilitasi Fraksi DPRD	110.000.000	11.700.250	10,64%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	849.866.000	457.187.035	53,80%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.700.000.000	2.219.803.900	82,21%
	<b>MENINGKATNYA KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP FASILITASI SEKRETARIAT DPRD</b>			
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>51.329.136.548</b>	<b>36.222.819.316</b>	<b>70,57%</b>

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
9	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>10.661.847.648</b>	<b>7.884.886.274</b>	<b>73,95%</b>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	179.964.500	41.083.000	22,83%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.096.137.548	3.159.684.251	62,00%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.131.872.800	2.655.650.388	84,79%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.253.872.800	2.028.468.635	90,00%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0	0	0,00%
10	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>3.847.962.600</b>	<b>2.044.770.624</b>	<b>53,14%</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	850.000.000	734.304.162	86,39%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	700.000.000	79.811.208	11,40%
	Pembahasan APBD	1.447.912.600	833.059.885	57,54%
	Pembahasan APBD Perubahan	650.050.000	282.495.987	43,46%
	Pembahasan Laporan Semester	150.000.000	111.796.982	74,53%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50.000.000	3.302.400	6,60%
11	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>2.794.297.500</b>	<b>1.651.000.303</b>	<b>59,08%</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	640.000.000	532.036.444	83,13%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	620.000.000	343.424.218	55,39%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	600.000.000	354.561.310	59,09%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	640.000.000	301.686.046	47,14%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0	0	0,00%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	49.999.500	27.657.480	55,32%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	194.299.050	62.016.600	31,92%

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	49.998.950	29.618.205	59,24%
<b>12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>12.564.499.900</b>	<b>11.111.130.270</b>	<b>88,43%</b>
	Orientasi DPRD	165.000.000	0	0,00%
	Pendalaman Tugas DPRD	2.000.000.000	1.512.347.697	75,62%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9.063.000.000	8.557.448.154	94,42%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	782.500.000	712.076.500	91,00%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	189.000.000	121.500.000	64,29%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	199.999.900	56.229.457	28,11%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	165.000.000	151.528.462	91,84%
<b>13</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>11.881.994.900</b>	<b>9.541.536.191</b>	<b>80,30%</b>
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.146.840.000	6.260.958.901	76,85%
	Pelaksanaan Reses	3.735.154.900	3.280.577.290	87,83%
<b>14</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>749.498.250</b>	<b>486.319.731</b>	<b>64,89%</b>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	49.999.250	34.918.000	69,84%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	699.499.000	451.401.731	64,53%
<b>15</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>319.324.300</b>	<b>127.044.800</b>	<b>39,79%</b>
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	5.044.800	5.044.800	100,00%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	314.279.500	122.000.000	38,82%
<b>16</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>8.509.711.450</b>	<b>3.376.131.123</b>	<b>39,67%</b>
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	207.499.750	2.025.000	0,98%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.300.000.000	2.171.840.369	50,51%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	852.211.700	383.544.660	45,01%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3.150.000.000	818.721.094	25,99%

Berdasarkan Tabel 3.1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2023, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100,60%
2. Predikat kinerja "Sangat Tinggi"

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : *IKM Internal Perangkat Daerah*

Evaluasi Hasil :

Dari target hasil survey internal kepuasan masyarakat (IKM) Internal sebesar 72, dan yang tercapai sebesar 85,47 atau 118% dari target yang hendak dicapai.

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

##### 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Evaluasi Hasil : Nilai Sakip sebesar 64,86 dengan predikat B yaitu "Baik"

##### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 90,62 dengan predikat A yaitu "Sangat Baik"

##### 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Kegiatan ini tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023

##### 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,66 dengan predikat B yaitu "Baik"

##### 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,38 dengan predikat B yaitu "Baik"

##### 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,92 dengan predikat B yaitu  
"Baik"

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,49 dengan predikat B yaitu  
"Baik"

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 83,62 dengan predikat B yaitu  
"Baik"

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Layanan Keuangan Keuangan dan Kesejahteraan  
DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 73,82 dengan predikat C yaitu  
"Kurang Baik"

10. Layanan Administrasi DPRD

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,54 dengan predikat C yaitu  
"Kurang Baik"

2. Program Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : *Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi*

Evaluasi Hasil :

Dari target 100 % yang tercapai adalah 83% hal ini dikarenakan mengikuti rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD.

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan  
Daerah dan Peraturan DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase kinerja sebesar 60%

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasiitasi Pembahasan Kebijakan  
Anggaran

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase kinerja sebesar 100%

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase kinerja sebesar 85%

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas  
DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase kinerja sebesar 75%

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Kinerja : Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi  
Masyarakat

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase kinerja sebesar 100%

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan  
Pengawasan Kode Etik DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

7. Pembahasan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan  
Kerjasama Daerah

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 50% dikarenakan kegiatan ini  
tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023

8. Fasilitas Tugas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitas Tugas DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 90%

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

#### 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Menentukan target secara realistis dan berdasar baseline data yang akuntabel, sehingga penentuan formulasinya dapat dipahami dengan baik saat pelaksanaan pencapaian target kinerja;
2. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran;
3. Melaksanakan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja untuk mendukung tercapainya target tujuan;
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi;
5. Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan unsur DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait;
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung tugas dan fungsi Instansi serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
7. Adanya inovasi-inovasi baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi sebagai wujud kebijakan atas strategi dalam menghadapi perkembangan isu strategis/permasalahan lokal, regional maupun nasional.

Demikian LKJIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun. Selanjutnya LKJIP ini akan dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerja di tahun berikutnya guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.

Balikpapan, 25 Maret 2024

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



ARFIANSYAH, S.T., M.Si



SEKRETARIAT DPRD  
KOTA BALIKPAPAN

# ***LAMPIRAN***

